

**Membangun Layanan Informasi Publik
Melalui Fitur-Fitur Website Desa¹**
(Kasus di Desa Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah)

Topohudoyo dan Budiyo²

Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Yogyakarta
Jalan Imogiri Barat, KM.5 Wojo, Bantul, Yogyakarta

Abstrak

Pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi Komunikasi dan Informatika, mulai mengemuka di desa-desa. Sekarang, bahkan mulai digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website desa dengan fitur-fitur yang dikembangkan telah menjadi medium yang potensial untuk meningkatkan layanan publik terutama di bidang informasi. Situs website yang tersedia digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan hasil pertanian, lokasi wisata, dan hasil kerajinan produk dari usaha kecil menengah. Sementara bagi warga desa bisa menjadi medium akses informasi pembangunan desa, dan juga sumbangsaran demi kemajuan desa. Pengembangan website desa ke ranah politik adalah menjadi medium interaktif pemerintah dan warga desa terkait program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kata kunci: *Website Desa, Pemerintahan Desa berbasis TIK, Medium interaktif pemerintah dan warga desa.*

Abstract

The development of Village Information System based on Communication Technology and Informatics, began to echo in the villages. Now, it even began to be used to improve public services. The research was conducted by qualitative study approach. The results showed that the village website with the features developed has become a potential medium to improve public services especially in the field of information. Available website sites are used by village governments to promote agricultural products, tourist sites, and handicraft products from small to medium sized businesses. While for the villagers could be the medium of information access to village development, as well as the contribution for the progress of the village. The development of the village website into the political sphere is to be an interactive medium of government and villagers on development programs that meet the needs of the village community.

Keywords: *Village Website, ICT-based Village Government, Interactive Medium of government and villagers.*

¹Tulisan ini dibuat sebagai hasil pembinaan kader peneliti di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta melalui program penelitian mandiri.

² Peneliti Madya-ivb dan Peneliti Madya-iv/c; BPPKI Yogyakarta.

Latar Belakang

Persoalan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa masih menghadapi tantangan dan hambatan. Ini karena keterbatasan media komunikasi yang mampu mempercepat proses pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah desa, demikian pun di lingkungan warga masyarakatnya. Biasanya komunikasi layanan diberikan secara manual dan tatap muka sehingga capaian target melayani semua warga memerlukan waktu yang cukup lama.

Hambatan ini biasanya terjadi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dikalangan masyarakat dan perangkat desanya yang menguasai TIK. Sehingga baik pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan penerimaan kebutuhan informasi warga desa menjadi tidak efisien. Dari kondisi demikian, diperlukan upaya pengembangan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi proses Layanan Informasi pembangunan oleh pemerintah desa kepada warga desanya.

Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi diperlukan kepemimpinan komunikasi yang transparan, agar program – program pemerintah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dapat diketahui secara transparan. Pola kepemimpinan komunikasi yang transparan dalam institusi pemerintah, memang sudah selayaknya untuk dikembangkan sejalan dengan dinamika reformasi politik yang menekankan perlunya pelayanan kepada publik yang lebih memadai dan lebih transparan.

Melihat di tingkat pemerintahan desa yang merupakan birokrasi terdepan

dan dekat dengan warga masyarakatnya sangat penting membangun pola kepemimpinan komunikasi yang baik demi pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik bisa dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik tatap muka maupun bermedia. Komunikasi bermedia akan sangat mendukung percepatan penyebaran informasi dan komunikasi dengan capaian sasaran yang lebih luas.

Sebelum ada media baru, kesenjangan *digital* antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang, seperti di Indonesia. Kondisi tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Tetapi sekarang dengan hadirnya media baru hingga ke masyarakat desa, sudah semestinya kesenjangan itu bisa dieliminir.

Itu sebabnya pemerintah berupaya mengembangkan program-program pembangunan, salah satunya di bidang TIK yang menjangkau masyarakat perdesaan. Pengembangan program *Universal Services Obligation (USO)* oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih ada. Hal tersebut, karena internet memiliki fungsi dan peran yang sangat mendukung kebutuhan aktifitas komunikasi dan pencarian informasi masyarakat. Itu sebabnya

kehadiran internet hingga ke tengah kehidupan masyarakat desa secara umum mendapat sambutan yang positif.

Sebagai media baru mereka diharapkan akan menunjang kebutuhan masyarakat, terutama sebagai medium akses komunikasi dan informasinya. Terkait dengan persoalan tersebut maka kehadiran program layanan pemerintah desa berbasis *website* yang dikembangkan pemerintah diharapkan bisa meningkatkan layanan publik di bidang informasi pada satu sisi, dan menjembatani proses komunikasi politik pemerintah desa dengan warganya di sisi lain.

Perumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah di atas, kiranya dapat dirumuskan masalah pokok penelitian, yaitu: “Bagaimana pengembangan peningkatan layanan informasi publik di tingkat desa terjadi melalui fitur-fitur *web* desa? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pengembangan layanan informasi publik di tingkat desa tersebut?” Selanjutnya, sejauh mana, pengembangan fitur *website* mampu menjembatani proses komunikasi politik diantara pemerintah desa dan warga negara?

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pengembangan layanan informasi dan komunikasi melalui situs *website* desa dan partisipasi politik warga dalam mendukung pembangunan desa. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang penyelenggaraan infrastruktur *website* desa sebagai

jembatan komunikasi politik pemerintah dan warga desa.

Penelitian ini signifikan karena 1) sesuai dengan pengembangan program pemerintah menciptakan *knowledge-based society* dan *information society* yang secara umum targetnya telah bisa dicapai pada 2015, sesuai amanat *World Summit Information Society (WSIS)*. 2) Mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan masyarakat perdesaan pada khususnya dalam pemanfaatan TIK; 3) mendukung implementasi regulasi pemerintah terkait tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu di level strategis, penelitian mengenai implementasi TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan yang dilakukan oleh Fathoni (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perdesaan secara optimal melalui pemanfaatan TIK perlu memerhatikan beberapa hal di antaranya membangun komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perdesaan, pendekatan pengenalan, dan pemanfaatan TIK dari sekolah, membangun berbagai jenis portal yang relevan dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang terdapat di daerah masing-masing, serta membangun kemitraan dengan industri dan jasa telekomunikasi.

Selain itu, penelitian mengenai TIK di tingkat desa misalnya penelitian tentang literasi TIK masyarakat desa pantai yang dilakukan oleh Siswanto (2012) menunjukkan bahwa tingkat literasi TIK

masyarakat desa akan berbeda-beda sesuai dengan letak geografis desa tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) mengenai program pembangunan *telecenter* di perdesaan (sebagai salah satu wujud pemanfaatan TIK) yang dilaksanakan oleh UNDP-Bappenas menunjukkan bahwa masyarakat desa sebenarnya membutuhkan *telecenter*, namun harus berfungsi sosial yang berarti mengutamakan tujuan sosial, misalnya membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan menyediakan akses informasi dan turut mengembangkan UKM. Namun berbagai masalah dihadapi yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang berada di desanya sendiri, kurangnya pengetahuan/pemahaman manajemen pemasaran berbasis *internet*, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pengurus tentang *telecenter*, serta kurang adanya kerja sama dengan berbagai lembaga lain yang berwenang seperti Kementerian Pertanian yang dapat membantu bidang pertanian serta Kementerian Perindustrian yang menangani UKM dalam mendayagunakan *telecenter* di desa.

Hasil penelitian Unair, ITB dan ITS (2011) di 4 Propinsi di Jawa juga menunjukkan bahwa ada peningkatan fasilitas TIK yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya, pada tahun 2009 6.2% penduduk yang memiliki komputer, kemudian meningkat menjadi 6.7% (2010), dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8%. Selain peningkatan jumlah kepemilikan, juga terjadi keragaman pemanfaatannya. Misalnya, *handphone* ini tidak hanya dipergunakan untuk akses telepon (*voice*), SMS, dan MMS melainkan fasilitas lain yang digunakan yakni internet.

Peningkatan akses komunikasi akan semakin meningkat saat Program Penyelenggaraan Jasa Internet (PJI) atau program Desa Pintar digulirkan. Penelitian yang dilakukan oleh 3 perguruan tinggi tersebut juga menemukan bahwa keberadaan telekomunikasi pada masyarakat pedesaan sangat diperlukan, bukan hanya untuk memfasilitasi dan melayani perkembangan ekonomi di masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki infrastruktur masyarakat pedesaan. Hal yang menarik adalah setidaknya sebanyak 84,4% masyarakat sangat mendukung apabila dikembangkannya desa berdering menjadi desa Pintar (desa yang mempunyai akses internet). Sebab masyarakat umumnya meyakini bahwa kemudahan akses informasi melalui internet akan mampu memajukan perkembangan desa, khususnya pendidikan anak-anak, pengetahuan masyarakat dan kemampuan usaha ekonomi masyarakat (Subiakto, H.)

Kerangka Konsep

Desa dan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Website/Situs Web dan Pengembangan Layanan Publik

Pengertian *Website* atau *Situs Web* dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link (Bunafit Nugroho, 2004).

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. *Website* ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui perkembangan teknologi informasi, tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan yang dikenal dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan-pesan elektronik, termasuk *e-mail*, transmisi *file*, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer (Akses, 9-5-2017, <http://raghibnuruddin217.blogspot.co.id>)

Terkait dengan penelitian ini yang mengangkat media *website* desa sebagai usaha meningkatkan layanan informasi publik, maka teori yang relevan untuk mendukung telaah adalah teori *Computer-mediated communication* (CMC). CMC ialah suatu transaksi komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih komputer jaringan. Istilah tersebut secara tradisional disebut komunikasi yang terjadi melalui mediasi format computer, misalnya, pesan instan, *e-mail*, *chat room* (Ummufaridah, 2010). Format tersebut

diterapkan pada bentuk-bentuk lain dari interaksi berbasis teks seperti pesan teks. Penelitian CMC berfokus pada dampak sosial yang berbeda yang didukung teknologi komunikasi-komputer.

Mediation ini mengacu pada proses pertukaran pesan dimana pesan disampaikan melalui perantara media. Dalam perkembangannya komunikasi melalui media komputer terjadi peleburan antara komunikasi *mediation* (perantara) dan *immediate* (langsung). CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia dibentuk melalui pertukaran informasi menggunakan media komputer khususnya komputer internet (Ummufaridah, 2010).

Pemenuhan layanan komunikasi dan informasi dari pemerintah desa ke warga masyarakat dan sebaliknya pemenuhan aspirasi masyarakat terhadap layanan informasi yang mudah dan cepat dalam media *website* desa diformat dengan penempatan fitur-fitur informasi dan komunikasi yang sangat beragam sesuai kebutuhannya, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fitur sebagai karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat (televisi, ponsel, dan sebagainya). Dalam kaitannya dengan teknologi komputer, fitur didefinisikan sebagai fungsi, kemampuan, atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat lunak.

Dalam kerangka *e-gov*, diyakini bahwa pengembangan *website* dengan fitur-fiturnya mampu meningkatkan layanan publik karena efisiensi dan efektivitasnya. Hidayaningrat (Suwondo, 2001: 29) mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan bagi masyarakat untuk memegang teguh syarat-syarat efisiensi,

efektivitas, dan penghematan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 butir 1, dikemukakan, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Lebih lanjut, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai "Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan" (lihat Holle, 2011).

Komunikasi Politik

Nimmo (2000:8) melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinter-pretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Pendapat ini diperkuat oleh Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi

artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Arifin, 2003:9).

Dari deskripsi di atas, komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif). Hal ini bisa diperkuat oleh pendapat Sumarno (1993:3) yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.

Menurut Sumarno (1993:2 8) fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. *Pertama*, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara *suprastruktur* dan *infrastruktur* yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Tulisan ini hanya berupaya untuk menjadi pengantar sebelum memasuki kajian komunikasi politik yang lebih intens atas peran *website* desa bagi sosialisasi informasi pembangunan di desa. Pengembangan *website* desa dengan berbagai konten atau isi informasi yang menunjang kebutuhan warga masyarakat dan informasi pembangunan desa, niscaya akan membantu pertumbuhan ke arah terbangunnya masyarakat informasi dalam lingkup perdesaan. Jika dalam setiap desa bisa merealisasikan konsep pengembangan *website* desa sebagai medium layanan informasi desa dan mendapat respon positif masyarakatnya, niscaya pengembangan masyarakat informasi secara lebih luas akan bisa terwujud. Disinilah wujud komunikasi politik yang dikembangkan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga masyarakatnya meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman pembangunan desa melalui pengembangan *website* desa,

Straubhaar menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi politik-sosial melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi. Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi (Straubhaar, 2002).

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan harapan metode ini mampu memaparkan fenomena yang ada dan terjadi secara lebih jelas, yaitu bagaimana proses pelayanan informasi publik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dapat berlangsung di level pemerintahan desa. Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Desa sebagai badan publik yang menyelenggarakan layanan Komunikasi dan Informasi Publik berbasis *website* desa. Pemerintah Desa yang dimaksud di sini adalah Pemerintah Desa Madukara, kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemilihan objek penelitian ini, dengan pertimbangan telah menyelenggarakan layanan informasi publik secara *online* melalui pengembangan *website* desa sebagai medium komunikasi dan informasi terkait dengan aktifitas pemerintahan dan layanan komunikasi dan informasi kepada warga masyarakat desa dan pihak-pihak lain terkait. Penelitian akan mengeksplorasi pemanfaatan TIK dilakukan di tingkat desa dalam mendukung pembangunan dan

kemandirian desa, memberikan gambaran mengenai pemanfaatan TIK di desa, dan menangkap keberhasilan desa tersebut dalam melakukan kegiatan pembangunan dukungan TIK.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapat data yang relevan guna menjelaskan permasalahan. Adapun sumber bukti yang dapat dijadikan fokus adalah situs web desa benchmarking, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yaitu proses pelayanan komunikasi dan informasi publik oleh pemerintah desa kepada warga masyarakat atau publik melalui fitur-fitur statis dan dinamis dalam *website* desa. Melalui observasi langsung peneliti dapat mengetahui para pelaku komunikasi secara interaktif maupun pesebaran informasi dalam situs web. Bagaimana melakukan layanan komunikasi dan informasi berbasis situs *web*, dan bagaimana warga masyarakat meresponnya. Sehingga dengan melihat interaksi komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi bisa memahami kondisi pelayanan komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintah desa.

c. Wawancara

Dalam penelitian studi kasus, wawancara menjadi sumber informasi yang sangat penting. Pelaksanaan

wawancara dilakukan menggunakan tipe *open ended* memberipeluang kepada peneliti untuk menanyakan berbagai hal terkait obyek penelitian kepada informan kunci. Wawancara juga untuk menanyakan berbagai peristiwa atau kejadian dan opini-opini mereka terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) terhadap Tokoh formal di desa seperti kepala desa, perangkat desa sebagai pengelola *website* desa) dan tokoh informal yang memahami kehadiran *web* desa.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi desa sebelum dan setelah memanfaatkan TIK (*webdesa*), bagaimana penggunaan *website*, dan manfaat apa yang diperoleh oleh desa dari pemanfaatan *website*. Berdasarkan data/informasi yang dikumpulkan, dapat diketahui bagaimana kondisi desa sebelum dan setelah memanfaatkan *webdesa*, bagaimana penggunaan dan manfaat apa yang diperoleh desa tersebut. Hasil observasi dan wawancara yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan selanjutnya berdasarkan data tersebut dapat digambarkan pemanfaatan *website* di tingkat desa.

d. Analisis Data

Data penelitian yang telah terkumpul melalui metode kualitatif, kemudian direduksi dengan merangkum, memilah data pokok, serta menfokuskan pada hal yang penting, setelah mereduksi data selanjutnya menampilkan data. Data kemudian akan dibandingkan dengan hasil benchmark yang telah dipilih. Setelah mendapatkan model

konseptual maka model tersebut akan diimplementasikan seperti rancangan out line di atas. Dalam penelitian ini akan disajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, tahap akhir proses ini adalah menyimpulkan dan membuat rekomendasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Desa Madukara

Madukara merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Madukara terletak pada ketinggian \pm 500 m dari permukaan air laut dengan luas wilayah 247, 748 Ha merupakan daerah pegunungan dan mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani. Pertanian yang menjadi andalan adalah tanaman salak pondoh. Di Desa Madukara Juga terdapat Pasar desa yang merupakan sumber perdagangan dan juga terminal Agribisnis yang memudahkan pendistribusian salak pondoh ke luar daerah seperti, Jawa Barat, Jakarta, Sumatra dll.

Secara demografis, berdasarkan data tahun 2014, Madukara berpenduduk berjumlah 2.566 orang, terdiri dari Laki-laki 1.315 orang dan Perempuan 1.251 orang. Mereka mayoritas berpendidikan sekolah dasar (41.22%), SLTP (17.44%) dan SLTA (13.75%). Sementara yang berpendidikan di level perguruan tinggi masih sangat sedikit.

Dari aspek kewilayahan, Madukara terdiri dari Lima (lima) Dusun, yaitu: 1) Dusun-I: Bogaraji; 2) Dusun-II: Kunci; 3) Dusun III: Laban; 4) Dusun IV: Sipete; 5) Dusun V: Pungangan (<http://madukara-banjarnegara.desa.id/index.php/first/artikel/34>)

Desa Madukara yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayahnya mencapai sekitar 247,748 ha, dengan jumlah penduduknya 2.580 jiwa dengan 770 KK. Mayoritas penduduknya berpendidikan tertinggi adalah SD, urutan kedua SLTP, SLTA dan sedikit yang tamat dari Perguruan Tinggi. Tidak Tamat SD: 211 orang; Tamat SD: 1.189 orang; Tamat SMP : 478 orang; Tamat SMA: 346 orang; Tamat Perguruan Tinggi : 83 orang. Selain potensi SDM yang masih terbatas, Desa Madukara memiliki beberapa potensi baik yang sudah tergali maupun belum tergali. Madukara dengan luas wilayah sekitar 247,748 ha dan mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani. Pertanian yang menjadi andalan adalah tanaman salak pondoh. Potensi lain, Di Desa Madukara terdapat “Pasar Desa” yang merupakan sumber perdagangan dan juga terminal Agribisnis yang memudahkan pendistribusian salak pondoh ke luar daerah seperti, Jawa Barat, Jakarta, Sumatra dan yang lainnya.

2. Sejarah Pembangunan Website

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tingkat dan kualitas layanan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Desa Madukara berkomitmen untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, Desa Madukara telah mengambil keputusan membangun *Website* Resmi Pemerintah Desa Madukara. “Keinginan kami ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarnegara.”

Keinginan tersebut semakin besar setelah kedatangan Tim Peneliti dari BPPKI KemKominfo Yogyakarta yang memberikan penjelasan (sosialisasi) manfaat dan pentingnya mengelola *Website* bagi pembangunan desa. Gayung bersambut ini akhirnya membuahkan hasil, yakni segera mempersiapkan tim TIK untuk mengikuti pelatihan Internet (TIK), yakni membangun *Website* desa. Laman *website* desa yang dibangun di www.madukara-banjarnegara.desa.id

Pelatihan teknis pembuatan dan pengelolaan *Website* dilaksanakan di Aula lantai 3 Setda Banjarnegara dari tanggal 9 s/d tanggal 11 Juni 2015. Dalam pelatihan, tidak hanya dari Madukara, namun bersama-sama dengan desa Kaliurip kecamatan Madukara, dan desa Bandingan Kecamatan Bawang, sehingga total peserta pelatihan mencapai 15 orang. Sampai saat ini, proses pembangunan *Website* masih berjalan.

Dengan terbangunnya laman *website* desa Madukara, kini pemerintah desa Madukara secara *de facto* telah menyanggah status sebagai pemerintahan berbasis *website* desa. Selanjutnya melalui situs *web* desa, pemerintah desa berkomitmen memberikan pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Menindaklanjuti komitmen tersebut, dibangun fitur-fitur layanan yang bersifat statis dan dinamis sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disalurkan kepada masyarakat atau publik.

Desa Madukara, sejak terbangunnya *website* desa, terus berupaya meningkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK melalui operasionalisasi *website* desa guna

meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakatnya. Dengan demikian orientasi tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal sosial. Itulah sebabnya pemerintah desa berupaya keras merealisasikan program *website* desa sebagai media sosialisasi informasi pembangunan desa. Juga bisa menjadi ajang komunikasi interaktif karena adanya ruang publik seperti rubrik komentar. Disini masyarakat bisa memberikan respon, berupa kritik, saran atau opini yang perlu disampaikan oleh warga kepada pemerintah desa.

Mengingat pentingnya *website* desa bagi media timbal balik pemerintah desa dengan masyarakat desa, oleh karenanya perlu adanya upaya pemeliharaan agar eksistensinya agar bisa terjaga dan dikembangkan. Semua itu perlu mempersiapkan sumberdaya pengelola yang memadai, artinya memahami seluk-beluk pemanfaatan dan perawatan eksistensinya.

Sebelumnya, guna mempersiapkan pengelolaan *website* desa yang akan dibangun, pemerintah desa telah memilih 5 orang perangkat mengikuti pelatihan TIK. Sehingga saat ini mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengoperasikan *website* desa sebagai media pelayanan komunikasi dan informasi. Pelatihan yang diselenggarakan kerjasama Dishubkominfo Banjarnegara dengan Tim Peneliti BPPKI Yogyakarta tidak disia-siakan untuk berlatih. Hasilnya perangkat desa dan perwakilan warga desa telah memiliki ketrampilan meski masih perlu terus dikembangkan. Setidaknya di proses awal melalui pelatihan TIK mereka telah mampu mengoperasikan *website* sebagai media layanan komunikasi dan

informasi di lingkungan pemerintah desa. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan beragam aktifitas kegiatan pemerintahan desa, dan berbagai dinamika pembangunan masyarakat desa telah bisa dilihat dalam fitur-fitur *website* desa.

3. Pengembangan Fitur Pelayanan Informasi Publik

Internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif yang dinamis terhadap penggunaannya, melebihi interaksi pada televisi dan radio (yang terbatas pada satu program dan isi materi acara). Bahkan, internet memberikan penawaran pencarian informasi yang diinginkan menggunakan kata kunci (keywords). Dengan keunggulan internet tersebut, maka efek komunikasi bermedia internet menjadi lebih bervariasi, dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat efektivitas media internet yaitu *website* desa dalam kajian komunikasi politik. Efek dari pesan yang disebarkan melalui fitur-fitur *website* desa itu sendiri meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif (Abidin 2015). Dalam kajian interpersonal, sesuai dengan penelitian Fardiah (2002), terdapat faktor-faktor interpersonal dalam perspektif komunikasi *cyberspace*, di antaranya; keterbukaan (*openness*), dalam komunikasi *cyberspace* amat membantu mereka yang tidak berani mengungkapkan

sesuatu pesan secara langsung; empati, yang mendapat keterbatasan karena kedekatan fisik tidak dapat digantikan dengan pikiran virtual; dan sikap mendukung dalam komunikasi *cyberspace* yang harus dijaga agar komunikasi yang diharapkan tercapai.

Maka, diharapkan dalam penelitian ini terdapat perubahan pada setiap tingkat efek dan peningkatan faktor-faktor interpersonal yang mendukung efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Pada tahapan awal, tampaknya semua pihak sangat mendukung atas kehadiran media *website* desa. Betapa tidak, dari aspek performen, sangat menarik, dari aspek fungsi sangat menguntungkan semua pihak baik bagi pemerintah desa maupun warga masyarakatnya, masyarakat semakin mendapat kemudahan akses komunikasi dan informasi dengan pemerintah desa. Bagi pemerintah desa sendiri, menjadi memiliki peluang untuk lebih transparan dan banyak mendapat masukan melalui pesan-pesan aspiratif dari warga yang ikut berpartisipasi memanfaatkan *web* desa sebagai sarana komunikasi pembangunan desa.

Gambar 1

Fitur-Fitur dalam Website Desa Madukara



Berdasarkan gambar 1 di atas, terlihat beberapa fitur yang dikembangkan oleh website Desa Madukara, diantaranya berita, produk desa, agenda desa, laporan desa, layanan desa, info pertanian, dan lowongan pekerjaan. Selain itu, masih ada fitur-fitur lainnya seperti komentar. Uraian berikut akan memaparkan sekilas fitur-fitur tersebut, terutama yang berhubungan langsung dengan layanan publik.

3.1. Berita

Fitur berita menjadi salah satu yang paling utama di *website* Desa Madukara. Melalui fitur ini, beragam berita terkait Madukara diunggah. Masyarakat dapat mengakses berita-berita tersebut sehingga menjadi tahu apa yang terjadi di sekelilingnya.

Berita ini di-*update* secara berkala, dan memberikan banyak informasi kepada warga masyarakat. Sebagai misal, pada 10 Agustus 2015, diunggah berita mengenai pelatihan di Desa Madukara.

3.2. Fitur Layanan Desa

Fitur layanan desa ini mencakup informasi mengenai layanan desa, diantaranya adalah layanan kependudukan dan perizinan. Layanan kependudukan diantaranya layanan mengenai *e-KTP*. Dalam fitur tersebut, dijelaskan syarat-syarat mengurus *e-KTP* di Desa Madukara. Selain informasi mengenai layanan *e-KTP*, masih banyak informasi layanan lainnya,

yakni perizinan usaha, nikah, tanda daftar gudang, dan seterusnya. Ada kurang lebih 22 syarat perizinan yang diinformasikan dalam fitur tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang akan memerlukan surat izin tinggal membuka website Desa Madukara. Hal ini jelas akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik desa karena informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet.

3.3. Fitur Komentar

Fitur komentar yang tersedia pada setiap artikel pada website www.madukara-banjarnegara.desa.id memudahkan pengakses untuk dapat memberikan *feedback* terkait informasi pada artikel tertentu, dengan mencantumkan alamat e-mail sebagai identitas, sehingga dapat meningkatkan minat pengakses untuk berinteraksi lebih lanjut dengan pengelola website, dibandingkan hanya membaca informasi dalam artikel. Internet opinion leader pun ikut aktif memberikan komentar dalam kolom komentar tersebut, sehingga terjadi interaksi yang lebih berkembang, tidak terbatas dengan pengelola *website*. Adanya suasana komunitas dapat dirasakan oleh pengakses website ketika berinteraksi terlebih dahulu dengan internet opinion leader di media sosial yaitu chatting pada *Facebook*. Hal ini disebabkan media sosial merupakan bentuk komunitas virtual yang menghubungkan individu-individu yang memiliki minat yang sama, dalam hal ini

minat akan perkembangan *website* desa di Indonesia. Aktivitas dan proses komunikasi bermedia internet salah satunya adalah berpartisipasi dalam forum untuk berkomunikasi yang merupakan awal penjelajahan karakteristik komunitas seperti tujuan bersama, norma-norma dan tradisi (Sosiawan 2011).

Pemerintah Desa Madukara telah berkomitmen mewujudkan pemerintahannya berkembang dengan baik, bisa merealisasikan seperti apa yang diharapkan menjadi pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan berintegritas dengan kemauan warga. Pengembangan *website* desa merupakan salah satu bentuk kebijakan penerapan layanan Informasi dan Komunikasi secara lebih terbuka kepada warga masyarakatnya. Dengan fitur berita pemerintahannya telah memberi peluang bagi warga desa ikut berpartisipasi membangun desanya. Warga masyarakat desa melalui *website* desa bisa memberikan kritik dan saran, dan lebih dari itu warga juga diharapkan bisa mendorong pembangunan desanya lebih maju melalui tulisan-tulisannya yang diunggah melalui *website* desa.

4. Website Sebagai Medium Komunikasi Politik

Dengan digulirkannya *website* desa untuk layanan komunikasi dan informasi di level pemerintahan desa, telah mengundang perhatian berbagai pihak terutama warga masyarakat yang

merasakan kehadiran *website* desa ternyata penting bagi akses kebutuhan informasi pembangunan di desanya. Seperti munculnya respon yang mengharapkan kehadiran *website* desa bisa menjadi sarana kemudahan pelayanan komunikasi dan informasi di tingkat desa, seperti pernyataan pengguna web di Wlahar Wetan 23 Maret 2016, berikut: “*Semoga dengan TIK menguatkan Pelayanan Desa yang semakin prima serta semangat membangun dengan jejaring Desa.id.*” (<http://madukara-banjarnegara.desa.id/index.php/first/artikel/108>)

“Kami Kepala Desa dengan seluruh Perangkat desa sangat berharap masukan/saran dan kritik dari warga desa dan pengunjung *website*. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan tidak akan membuahkan hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat semua. Untuk itu marilah kita bersama-sama membangun desa ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan bahu membahu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan...”

Salah satu respon masyarakat dapat dilihat pada komentar postingan terkait sampah berikut:

ADMIN 25 NOVEMBER 2015 08:36:05 WIB
Rabu, 25 November 2015 Pukul 09.30 wib
Di Balai Desa Madukara Acara Sosialisasi
Kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara

Komentar atas Sosialisasi
Pengelolaan Sampah

hudiyono 25 November 2015 14:15:18 WIB

*Dengan Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Sampah, yg dilaksanakan
hari ini di Balai Desa Madukara, semoga
dapat mengatasi permasalahan sampah
yang ada di lingkungan kita :
lapangan/balai desa/kantor desa
Madukara. Sangat tidak bersahabat
dengan adanya bau sampah yang
menyengat serta banyaknya lalat dari
tempat sampah tersebut, sehingga warga
sekitar tempat sampah sangat tidak
nyaman dengan adanya bau yang
ditimbulkan dan banyaknya lalat yang
sampai ke lingkungan perumahan,
KALAU TIDAK DAPAT DIATASI
SEBAIKNYA TEMPAT PEMBUANGAN
SAMPAHNYA DIPINDAH KE TEMPAT
YANG JAUH DARI LINGKUNGAN
PERUMAHAN, MAUPUN ARENA
BERMAIN/ OLAH RAGA, semoga.*

Selama ini kebiasaan warga dalam mencari Informasi melalui menggunakan saluran *face to face*, system getok tular, dari mulut ke mulut, lebih maju lagi via surat kabar dan media elektronik (radio dan televise). Bagi mereka yang terbiasa mengikuti kegiatan organisasi social/

kemasyarakatan, biasanya informasi hasil pencariin dari berbagai sumber dibawa ke forum musyawarah desa (“mudes”), untuk disebarkan pada warga yang lain. Jika terkait dengan kebutuhan informasi untuk komunitas tertentu (misalnya petani), seperti informasi mengenai harga pupuk, system pengairan dan sebagainya mereka bisa mendiskusikan di forum Mudes.

Saat ini kebiasaan itu sudah mulai ditinggalkan, mereka mulai memanfaatkan saluran komunikasi yang lebih modern melalui akses internet, di dunia maya. *Fasebook, tweeter, email, faximail* dan sebagainya yang menurutnya dipandang lebih praktis dan fleksibel. Komunikasi dunia maya inilah yang saat ini mulai dikembangkan oleh masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja dan yang tua. Itu sebabnya pengembangan medium komunikasi berbasis internet kini pun mulai dikembangkan tidak saja di tengah kehidupan sosial masyarakat, namun juga di lingkungan lembaga birokrasi pemerintahan, baik di level pemerintah pusat, daerah maupun di tingkat desa.

Di level pemerintah desa, kini mulai berkembang, meski masih dalam proses pembelajaran, menggunakan layanan-layanan informasi kepada warganya menggunakan layanan secara *online* melalui *website* desa. Kehadiran Internet melalui program pengembangan *website* desa tentu memberi peluang yang sangat baik bagi kelancara proses komunikasi antara pemerintah desa dengan warganya. Melalui berbagai fitur yang tersedia bisa

dikomunikasikan tentang berbagai hal terkait berlangsungnya pengelolaan pemerintahan desa, informasi pembangunan yang ada di desanya, maupun pengembangan aspirasi warga desa melalui fitur “opini publik” atau “pendapat warga”.

Berdasarkan realitas pengembangan *website* desa, yang telah menunjukkan nilai-nilai positifnya tentu kita tidak boleh terlena merasa puas dan tidak bergerak lagi. Kita dituntut untuk senantiasa mengembangkan upaya mempertahankan dan meningkatkan lagi apa yang sudah ada. *Website* desa tidak bisa dibiarkan tanpa berbuat lebih maju lagi. Bagaimanapun dinamika kehidupan terus berkembang dan tuntutan warga terus bertambah. Oleh karenanya keberadaan *website* desa sebagai media komunikasi pembangunan desa yang sangat dibutuhkan, perlu terus dibenahi dengan menambah fitur-fitur yang bisa memenuhi tuntutan warga sebagai media publik. Hal inilah yang sebenarnya menjadi sasaran pengembangan program USO dalam menjembatani kesenjangan informasi di tengah masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus pemasangan internet desa yang mangkrak ditinggalkan penggunaannya, karena tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat sebagai media yang memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dari kondisi yang demikian, tentu perlu ada langkah tindak lanjut untuk terus mengevaluasi sampai sejauhmana

efektifitas program *website* desa bisa memenuhi harapan pemerintah dan warga desa sebagai medium komunikasi publik, dalam memper-cepat akses telekomunikasi yang terus berkembang. Tanpa adanya evaluasi signifikan, dikhawatirkan program pemerintah yang telah menghabiskan banyak dana pembangunan akan mubadzir tidak menghasilkan manfaat yang berarti bagi pembangunan masyarakat desa, khususnya di bidang pengembangan komunikasi politik pemerintah desa dan warganya berbasis *website* desa.

Penutup

Dari pembahasan program pengembangan *website* desa sebagai media layanan informasi publik terkait dengan layanan pemerintahan desa secara *online*, menunjukkan terjadinya dinamika komunikasi dan informasi di tingkat masyarakat desa. Saat ini pemerintah desa beserta warga desanya merasa cukup gembira dengan hadirnya sarana *website* desa sebagai media yang bisa mengkomunikasikan dua kepentingan. Pertama kepentingan pemerintah desa yang sangat membutuhkan forum atau media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang pelayanan publik bagi proses pemerintahan desanya untuk mengeliminir image pemerintahan yang kurang transparan dan demokratis. Maka dengan adanya *website* desa saat ini kekhawatiran tersebut bisa dihilangkan, setidaknya dieliminir. Hal tersebut karena

pemerintah desa melalui *web* desanya bisa mengkomunikasikan secara langsung tentang keberadaan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diampunya dan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan desanya bisa disosialisasikan melalui fitur-fitur layanan informasi yang ada dalam *website* desa.

Kedua kepentingan warga masyarakat desa yang membutuhkan informasi terkait dengan mekanisme layanan pemerintah desa bisa diketahui dari akses terhadap *website* desa. Demikian-pun terkait dengan kebutuhan informasi lainnya yang diperlukan. Mereka tinggal membuka akses terhadap *website* desa, bisa mengetahui informasi apa yang mereka perlukan. Tentu sebatas yang telah disediakan oleh para pengelola *website* desa. Selain itu bagi warga desa, akan dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka melalui ruang publik yang disediakan oleh pemerintah desa untuk warga yang ingin berpartisipasi.

Dengan demikian keberadaan *website* desa sangat membantu terjalinnya komunikasi antar pemerintah desa dengan warganya. Hal demikian tentu menjadi nilai positif yang perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk membangun komunikasi yang efektif dan mengembangkan sistem demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang semakin dinamis dengan memanfaatkan *website* desa.

Berbagai hal yang perlu direkomendasikan, adalah eksistensi pengelolaan *website* desa perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melengkapi data desa yang belum tersosialisasi. Koordinasi dengan pihak-pihak pembina pemerintah desa maupun mitra kerja pengembangan *website* desa juga perlu terus diupayakan untuk menambah informasi pengembangan *website* desa yang lebih baik lagi bagi kepentingan pemerintah desa dan warga desa dalam meraih cita-cita kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Bachrein, Saeful. (2010). *Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8 No. 2, Juni 2010, hal. 133149.
- Holle, Erick S., *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*, Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011 https://ejournal.unpatti.ac.id/pr_iteminfo_inlk.php?id=104
- Nugroho Bunafit, 2009. *Membuat Website Sendiri Dengan PHP-MSQL*, Mediakita, 2009 [
- Lexy J Moleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Leo Agustino S.Sos, MSi, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Puji Lestari/ Machya Astuti Dewi, 2010. *Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010, halaman 191 - 203
- Pudji Muljono, *Pemanfaatan Internet Sebagai Media Komunikasi Di Indonesia* (Bogor: Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA, 2005), hal. 5.
- Panuju, Redi, 2002. *Relasi Kuasa: Pertarungan Memenangkan Opini Publik dan peran dalam Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Robert Eyestone, *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*, Indianapolis: Bobbs Merrill, 1971
- Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Santoso, Widjajanti M. (2011). *Internet Masuk Desa*, Rekam Jejak Pendirian Telecenter di Indonesia.
- Serverin, J, Werner dan JW Tankard Jr, 2005, *Teori Komunikasi, Sejarah, metode dan Terapan di Dalam Media massa*, Kencana, Jakarta.
- Sudarwan Darwin, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, PT, Jakarta, 2005.
- Siswanto, Sudji. (2012). *Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Masyarakat Desa Pantai*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2012). hal. 81-110
- Supriadi, Dedi. 1992. *Studi Tentang Profil Pelanggan dan Manfaat Sosial-Ekonomi Telekomunikasi Pedesaan*. Jakarta: PT. Telekomunikasi Indonesia;
- Suwondo. (2001). *Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Thomas R. Dye, 1992. *Understanding Publikk Policy*, New Jersey: Prentice Hall,

Internet:

- Dalila Sadida, 2010. *Media Literasi*, <http://sadidadalila.wordpress.com/2010/03/20/media-literasi/Akses,7-10-2016>
- Didik Kusbiantoro, 2009. *Merajut Akses Komunikasi Desa-Desa Terpencil*, <http://www.news.id.finroll.com/articles/59330-merajut-akses-komunikasi-desa-desa-terpencil-oleh-didik-kusbiantoro.html> Akses, 2-10-09;
- Fathoni. (2010). *Strategi Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Seminar Nasional VI, 3 Juli 2010, Yogyakarta. Dalam <<http://eprints.unsri.ac.id/2818/>>. diakses 3 Oktober 2014.
- Prakosa, Adi, 2007, *Uses & Gratification*, <http://adiprakosa.blogspot.-com/-2007/11/uses-gratification.html> Akses, 14-2-2010;
- Setyafi dkk., *Teori Strukturasi*, http://setyafi.multiply.com/journal/item/9/TEORI_STRUKTURASI Akses, 23-2-2010;
- Straubhaar, Joseph dan La Rose, 2002, *Media Now: Communication Media in the Information Age*: Wadsworth:Australia, dalam AG. Eka Wenats Wuryanta, M.Si, *Literasi Informasi, Masyarakat dan Media Baru*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, <http://lib.znate.ru/docs/index-221478.html> Akses, 17-12-2013
- Ummufaridah, 2010. Makalah Mengenai *Computer Mediated Communication*, http://ummufaridah.blogspot.co.id/2010/06/computer-mediated-communication-cmc_13.html, akses, 6-4-2017.
- Uwes Fatoni, 2008. *Pengantar Komunikasi Politik*, <http://haerilhalim.wordpress.com/category/komunikasi-politik/> Akses,7-10-2016
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
-, Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Yang Memiliki Kemampuan Internet (Desa Pinter)
-, *INTERNET MASUK DESA*, [HTTP://MEKARSAJIRA.WORDPRESS.COM/CATEGORY/TENTANG-WARNET/MANFAAT-INTERNET/](http://MEKARSAJIRA.WORDPRESS.COM/CATEGORY/TENTANG-WARNET/MANFAAT-INTERNET/) DIAKSES, 2-1-2013
-, *Literasi Informasi, Masyarakat dan Media Baru*, <http://lib.znate.ru/docs/index-221478.html> Akses, 17-12-2013